

RESPONS NAHDLATUL ULAMA PONOROGO TERHADAP GERAKAN ISLAM FUNDAMENTALIS

Luthfi Hadi Aminuddin*

Abstrak:

Penelitian ini ditujukan untuk mengungkap respons Nahdlatul Ulama Ponorogo terhadap dakwah dan ajaran dari gerakan Islam Fundamentalis. Gerakan Islam Fundamentalis dicirikan sebagai gerakan-gerakan Islam yang hendak kembali kepada pondasi dasar ajaran Islam dan tradisi kenabian dengan pemahaman terhadap teks yang cenderung harfiah, menonjolkan klaim kebenaran, mempertentangkan Islam dan NKRI, serta menyerang praktik-praktik keagamaan kalangan tradisionalis. Gerakan Islam fundamentalis tersebut sekarang mulai mengembangkan dakwah dan ajarannya di kantong-kantong Nahdlatul Ulama seperti di Ponorogo dan sekitarnya. Untuk menggali data, penulis melakukan wawancara dengan beberapa tokoh sentral NU Ponorogo dan studi terhadap beberapa dokumen serta literatur. Penelitian ini mendapati bahwa untuk merespons gerakan Islam fundamentalis, para kiai NU di bawah koordinasi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Ponorogo, mendirikan Aswaja NU Center. Lembaga ini kemudian mengkoordinasi beberapa bentuk program dan kegiatan dalam rangka meng-counter gerakan Islam fundamentalis. Program tersebut adalah: 1) *Dauroh Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* (Dakwah), 2) *Kajian Islam Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* (Kiswah), 3) *Usaha sosialisasi Islam Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* (Uswah), 4) *Maktabah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* (Makwah); dan 5) *Bimbingan Islam Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* (Biswah).

Kata kunci: *respons, Nahdlatul Ulama Ponorogo, gerakan Islam fundamentalis*

* Penulis adalah dosen STAIN Ponorogo.

PENDAHULUAN

“Fundamentalisme telah menusuk ke jantung NU”, kalimat itu terucap dalam sebuah forum diskusi di tahun 2009 yang menghadirkan Kacung Marijan, Guru Besar Sosilogi dari Universitas Airlangga Surabaya, yang berbicara tentang pergeseran pemahaman warga NU dari moderat ke fundamentalis, yang difasilitasi oleh Jaringan Islam Liberal.¹ Pemahaman Islam yang puritan dan cenderung radikal telah meringsek ke kantung-kantung Nahdhatul Ulama. Tidak hanya di wilayah pinggiran, pemahaman itu juga telah menusuk ke jantung NU sebagaimana tampak pada terjadinya pergeseran pemahaman terhadap Islam oleh elit NU maupun di pesantren-pesantren yang menjadi basis gerakan organisasi ini.

Azyumardi Azra yang juga hadir dalam forum tersebut tidak menampik adanya pergeseran pemahaman keagamaan itu, bahkan dia menyebut adanya usaha sistematis untuk masuk dan menguasai lembaga-lembaga NU. “Di dalam lingkungan NU terjadi tarik menarik antara kekuatan yang dianggap liberal dan kekuatan yang dianggap lebih konservatif, bahkan mungkin ultrakonservatif,” katanya. Hal itu, menurut Azra, menyebabkan organisasi lamban merespons masalah-masalah mendasar, khususnya terkait radikalisme dan terorisme. “Kadang-kadang NU terlalu meremehkan dan tidak mau tegas menghadapinya,” imbuhnya.² Sikap lamban tersebut pada akhirnya menjadi lahan empuk penyemaian paham fundamentalis di tubuh dan pesantren-pesantren NU. Dengan kata lain, fenomena pergeseran pemahaman warga NU dari sikap moderat menjadi fundamental merupakan cermin lemahnya NU dalam menyikapi tantangan eskalasi gerakan fundamentalis yang mengusung simbol-simbol agama dalam wilayah politik, seperti ambisi mendirikan khilafah islamiyah, menggantikan Pancasila dengan ideologi kaum fundamentalis, dan penerapan syariat Islam yang kontroversial bagi negara pluralistik dan heterogen seperti Indonesia.

Jika kegelisahan para pakar di atas sudah terlontar sejak 2009, sangat mungkin, penyebaran “virus” fundamentalisme saat ini sudah menggerogoti seluruh tubuh NU: pesantren, nahdhiyin struktural

¹ Ahmad Arif, Fundamentalisme di Jantung NU, <http://pol2009.blogspot.com/2010-/03/fundamentalisme-di-jantung-nu.html>. Diakses 1 April 2015

² Ibid.

maupun kultural, mengingat gerakan fundamentalis saat ini sangat masif-eskalatif meringsek maju dan merebut simpati para warga NU.

Pendirian organisasi (*jam'iyah*) NU pada 1926 adalah respons terhadap pemahaman Islam garis keras yang muncul dari berkuasanya kelompok Wahabi di Arab Saudi yang menekankan pada "pemurnian" Islam dengan wadah "negara Islam". Ulama NU kemudian menyerukan ajaran yang berbasis konteks lokal, lebih lembut, damai, dan menghormati keberagaman.

Kacung Marijan mengatakan, salah satu sumbangan terbesar NU adalah mengembangkan ajaran Islam *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah* yang kontekstual dengan kondisi lokal. Di dalam ajaran demikian, Islam yang diimban bukan saja "Islam tengah", melainkan juga ajaran Islam yang dianut orang Indonesia. Adanya penghormatan terhadap kultur lokal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam telah menjadi karakteristik penting gerakan NU. Sejak awal NU berusaha menampilkan wajah Islam di Indonesia sebagai Islam yang dianut oleh orang Indonesia, bukan Islam yang dianut oleh orang Arab. "Karena pemahaman ini, konteks lokal Islam menjadi sangat kuat," kata Kacung.³

Dalam sebuah acara yang digelar oleh salah satu Pengurus Wilayah GP Ansor di kawasan Sumatera, Ketua Umum PBNU, KH. Said Aqil Siradj, dengan tegas mengatakan bahwa Wahabisme merupakan ancaman yang cukup berbahaya bagi kelangsungan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Meskipun kaum Wahabis bukan termasuk teroris, namun Wahabisme, menurut alumnus Pesantren Lirboyo ini, telah menyediakan landasan teologis yang cukup kuat bagi munculnya aksi-aksi terorisme di berbagai belahan bumi ini. Lihat saja sejumlah aksi kekerasan berwatak teror di sejumlah negara di dunia ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh dan kontribusi dari ajaran dan doktrin Wahabisme.⁴

Statemen beberapa tokoh di atas tersebut tentu saja bisa dikatakan mewakili sikap NU (PBNU) terhadap menguatnya gerakan Wahabisme kontemporer⁵ yang dalam beberapa tahun belakangan

³ Ibid.

⁴ Statemen ini disampaikan oleh Said Aqil Siradj, ketua umum PBNU, dalam sebuah bedah buku "Sejarah Berdarah Sekte Salafi-Wahabi" yang diselenggarakan oleh GP Ansor Kepulauan Riau di Batam pada 05 Februari 2012.

⁵ Sifat kontemporer di sini mengacu pada definisi yang diberikan oleh Noorhaidi Hasan terhadap kelompok Salafi kontemporer. Menurutnya, (Salafi)

ini, terutama pasca reformasi, tampak mencolok sekali di Indonesia.⁶ Sebagai organisasi sosial keagamaan yang setia mengamalkan tradisi-tradisi keagamaan yang berbasis budaya lokal seperti *tahli*, *shalawatan*, *istighāshah*, ziarah wali, dan seterusnya, NU memang kerap menjadi sasaran empuk bagi dakwah-dakwah Wahabi yang sangat puritan dan mencela tradisi-tradisi keagamaan tersebut. Akibatnya, NU selalu mengambil posisi di garda terdepan dalam upaya membela tradisi-tradisi keagamaan lokal tersebut dari serangan kaum Wahabi.

Sikap tegas terhadap Wahabi ini tampaknya bukan suatu yang baru belakangan ini saja ditunjukkan oleh NU, mengingat dalam sejarahnya, latar belakang berdirinya NU pada tahun 1926 sendiri adalah sebagai respon, atau lebih tepatnya bentuk perlawanan para pendiri NU terhadap menguatnya rezim Wahabi di Arab Saudi.⁷ Namun sikap NU terhadap Wahabi kontemporer kali ini menunjukkan sebuah gambaran yang paling vulgar dan lebih “berani” dari sikap-sikap mereka sebelumnya. Bahkan dalam beberapa kesempatan dan forum yang diadakan, NU hampir selalu menyelipkan isu akan bahaya ancaman Wahabisme, bukan saja bagi NU sendiri, melainkan juga bagi keutuhan NKRI.⁸

Wahabisme kontemporer adalah bentuk Wahabisme yang dikemas ulang dan lebih memperlihatkan tekad para tokohnya untuk mengkodifikasi dan mengikuti lagi secara lebih sistematis pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh tiga pemikir klasik di kalangan Wahabi, yakni Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim al-Jauziyah, dan Muhammad Bi Abdul Wahab, dan ulama Wahabi lainnya seperti Abdul Aziz Bin Baz, dan Nashiruddin al-Albani. Lihat Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde Baru*, (Jakarta: LP3ES, 2008), 34.

⁶ Indikator menguatnya gerakan wahabisme ini bisa dilihat dari munculnya sekelompok umat Islam dengan pakaian khas timur tengah (jalabiyah bagi laki-laki dan bercadar bagi perempuan) di ruang-ruang publik Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Yogyakarta dan Bandung dengan aktifitas dakwah yang mencela praktik-praktik keagamaan yang dipandangnya syirik dan bid'ah seperti tahlil, sholawatan, maulid nabi, dan lain sebagainya. Lihat Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad*, 31. Bandingkan juga dengan Ahmad Bunyan Wahib, *Gerakan Dakwah Salafi Pasca Laskar Jihad*, Electronic Research Paper-Researc Paper Vol. 03, No. 1, 2008, dan M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Gerakan Revivalisme Islam ke Indonesia (1980-2002)*, (Jakarta: Erlangga, 2005).

⁷ Tentang kaitan berdirinya NU dengan menguatnya Wahabisme di Arab Saudi ini lihat Andre Feillard, *NU Vis a Vis Negara*, (Yogyakarta: Penerbit LKIS, 1999), 7-14. Bandingkan juga dengan Choirul Anam, *Pertumbuhan, dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, (Solo: Penerbit Jatayu, 1985), 57. Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama* (Yogyakarta: LKiS, 2000), 21-28.

⁸ Dalam sejumlah pertemuan konsolidasi yang digelar oleh PBNU, Wahabisme disebut-sebut sebagai ancaman bagi keberlangsungan NKRI dan Islam di Indonesia

Kampanye anti-Wahabisme ini tampaknya bukan saja bergema di kalangan struktural NU, melainkan juga telah menjadi isu utama di kalangan kelompok kultural NU.⁹ Kalangan kaum muda NU di jalur kultural yang sebelumnya kerap bersebrangan dengan kalangan kaum tua yang ada di struktur dan pesantren-pesantren, kini tampak kompak dan bertemu dalam isu besar anti-Wahabisme. Begitu pula sumberdaya struktural berupa kelengkapan organisasi yang dimiliki oleh NU mulai dari tingkat pusat (PBNU) hingga tingkat Ranting yang berada di pedesaan, dimobilisir untuk membendung ekspansi dakwah Wahabi. Rasa keterancaman terhadap Wahabisme seolah telah membangkitkan kembali soliditas dan solidaritas gerakan sosial NU yang sebelumnya banyak diwarnai oleh konflik-konflik internal akibat keterjebakan mereka dalam kubangan politik praktis.¹⁰

Salah satu komponen yang terlibat cukup intens dalam gerakan anti-Wahabisme di kalangan NU adalah masyarakat NU Ponorogo. Dengan sumberdaya yang dimilikinya, baik dari elemen struktural maupun kultural, masyarakat NU Ponorogo tampak cukup pro-aktif dalam meng-*counter* gerakan-gerakan yang diusung oleh kaum Wahabi. Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan, banyak kegiatan yang dirancang oleh kalangan NU struktural, baik di tingkat cabang (PCNU), hingga ke tingkat Ranting yang secara eksplisit maupun implisit diarahkan untuk merespon gerakan Wahabi. Begitu juga kelompok kultural NU dari kalangan anak muda, mahasiswa, pesantren, LSM dan masyarakat *awam* yang terorganisir sebuah gerakan tertentu untuk merespon menguatnya ajaran Wahabi.

Penelitian ini akan mengidentifikasi bentuk-bentuk gerakan Islam fundamentalisme dan pengaruhnya bagi *jam'iyah* dan *jamā'ah* NU serta memotret sejumlah respons yang ditunjukkan oleh komunitas

yang telah dikenal berwatak santun dan damai. Lihat laporannya di www.nu.or.id/berita/

⁹ Kalsifikasi NU kultural dan NU struktural ini mengacu pada pengakuan yang diberikan oleh tokoh NU sendiri, seperti KH. Muchit Muzadi dalam NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran, (Surabaya, Khalista, 2006), 35.

¹⁰ Tentang konflik dan intrik internal di dalam tubuh NU akibat permainan politik praktis ini lihat, Endang Turmudzi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), Khoiruddin, *Politik Kiai, Polemik Keterlibatan Kiai dalam Politik Praktis*, (Malang: Avverous, 2009), Khoro Ummatin, *Perilaku Politik Kiai*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). Nur Khalik Ridwan dan M. Nur Hasyim, *Demoralisasi Khittah NU dan Pembaruan*, ((Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004).

NU Ponorogo terhadap menguatnya gerakan Islam fundamentalisme tersebut.

HASIL PENELITIAN

A. Pemahaman Tokoh NU terhadap Gerakan Islam Fundamentalisme

Secara garis besar, gerakan Islam fundamentalisme dipahami oleh para tokoh Nahdlatul Ulama Ponorogo sebagai gerakan Islam yang ingin mengembalikan praktik keagamaan sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Dalam hal ini, Islam fundamentalisme diidentikkan dengan Islam Wahabi.

Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan beberapa pengurus Nahdlatul Ulama Ponorogo. KH. Imam Sayuti Farid, Rois Syuriah PCNU Ponorogo, ketika memberikan sambutan pada daurah aswaja mengatakan:

“sekarang ini kita umat Islam, utamanya warga NU dihadapkan pada tantangan besar yaitu apa yang banyak disebut-sebut belakangan ini dengan Islam Fundamentalis, Islam radikal, Islam wahabi, dan sebagainya. Pada prinsipnya mereka mengeluarkan jargon kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah. Semua praktik-praktik keagamaan yang bertentangan atau tidak ditemukan dasar hukumnya di dalam al-Qur'an dan al-sunnah maka dianggap bid'ah...dan celaknya setiap bid'ah adalah sesat dan ketika sesat, maka nerakalah tempat yang pantas bagi mereka pembuat bid'ah. Oleh karena itu, praktik tahlilan, yasinan, diba'an dan rata-rata amalan orang NU dianggap sesat oleh mereka, karena dianggap bid'ah dan tidak ada dasarnya”¹¹

Hal senada juga disampaikan oleh Drs. Fatchul Azis, M.A, ketua Tanfidziyah PCNU Ponorogo:

“Kita warga NU mengalami kondisi yang yang mirip dengan kondisi menjelang dan pada saat NU akan didirikan oleh Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asyari, yaitu Umat Islam (warga NU) dihadapkan pada gerakan Wahabi yang mengkritik habis-habisan terhadap praktik keagamaan orang NU seperti *sholawatan*, *yasinan*, *tahlilan* dan sebagainya. Saat itu amalan ulama tradisonal (dalam hal ini NU) dianggap sebagai amalan yang sarat dengan TBC, apa itu...*tahayyul*, *bid'ah* dan *khurafat*.¹²

¹¹ Disampaikan pada sambutan pembukaan Daurah Aswaja di Graha Watoe Dhakon, 11 November 2011.

¹² Disampaikan pada sambutan Turba di MWC Kecamatan Babadan, 04 Agustus 2013.

Dari situ tampak bahwa KH. Imam Sayuti Farid dan Fatchul Azis menyatakan bahwa beberapa kritikan, cibiran bahkan ejekan kaum reformis terhadap amalan para ulama tradisional adalah menjadi salah satu faktor mengapa NU didirikan.

Pada awal abad XX, seiring dengan pudarnya kejayaan *khilāfah Islamīyah* dan dihapusnya jabatan khalifah oleh Musthafa Kemal Attaturk pada tahun 1924, di Timur Tengah muncul gerakan Wahabī yang dipelopori oleh Ibn ‘Abd al-Wahhāb (1703-1791 M), yang oleh Fazlur Rahman disebut sebagai gerakan revivalisme pra-modernis.¹³ Sedangkan menurut Thoha Hamim, gerakan Wahabī berakar pada gerakan purifikasi Islam sebagaimana dibela oleh Ibn Taymīyah (1263-1328 M), yang beranggapan bahwa tidak ada otoritas lain kecuali al-Qur’ān, ḥadīth dan praktik *salaf*. Dalam pandangan Ibn Taymīyah, praktik *ijtihād* adalah sentral pemikiran Islam. Dengan membuka *ijtihād*, Ibn Taymīyah mengakui independensi akal manusia yang memungkinkan dia untuk meninggalkan peniruan kepada orang lain (*taqlīd*). Lebih jauh, Ibn Taymīyah juga mengkafirkan terhadap praktik-praktik keagamaan populer yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, sahabat dan tabi’in, yang dikenal praktik bid’ah.¹⁴ Buah pikirannya ini teraktualisasi ke dalam hidupnya yang diwujudkan

¹³ Gerakan ini bercirikan: tidak terkena sentuhan Barat, keprihatinan mendalam terhadap degradasi sosio-moral umat Islam dan usaha untuk mengubahnya, menghimbau untuk kembali kepada Islam yang sejati dan mengenyahkan tahayul-tahayul yang ditanamkan oleh bentuk-bentuk sufisme populer, meninggalkan gagasan tentang kemapanan dan finalitas madhhab serta berusaha melaksanakan *ijtihād*, himbauan untuk mengenyahkan corak predeterministik, dan melaksanakan itu semua dengan kekuatan senjata bila perlu. Mengenai dinamika perkembangan pembaharuan yang muncul ke dunia Islam, Fazlur Rahman, membaginya ke dalam empat tipe gerakan: revivalisme pra-modernis, modernisme klasik, neo-revivalisme, dan neo-modernis. Lihat Taufik Adnan Amal, “Fazlur Rahman dan Usaha-Usaha Neo-Modernisme Islam Dewasa Ini”, dalam Fazlur Rahman, Metode dan Alternatif Neo-Modernisme Islam, ed. Taufik Adnan Amal, (Bandung: Mizan, 1994), 17-18.

¹⁴ Praktik-praktik keagamaan populer ini, umumnya berhubungan dengan elemen waktu dan tempat. Elemen waktu, misalnya dapat dilihat dalam penghormatan terhadap hari Kamis malam Jumat pada bulan Rajab yang disebut *al-raghā’ib*. Bentuk penghormatannya dengan menjalankan *ṣalāt al-raghā’ib*. Elemen tempat, misalnya pemujaan kuburan-kuburan orang suci, yang diyakini Ibn Taymīyah berpengaruh buruk bagi moralitas hidup muslim, karena hal itu mengarah pada perbuatan syirik. Tidak hanya itu, Ibn Taymīyah juga mengkritik praktik-praktik kaum sufi, para filsuf dan mutakallimūn hingga kaum Shi’ah. Lebih lanjut baca: Thoha Hamim, Paham Keagamaan Kaum Reformis: Studi Kasus Pemikiran Moenawar Chalil, terj. Imron Rosyidi (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 11-30.

dengan memimpin kampanye melawan berbagai ritus *tahayyul* guna menemukan kembali *rūḥ al-tawḥīd*.¹⁵

Karakteristik pembaharuan agama Ibn Taymīyah tersebut, dibangkitkan kembali Ibn ‘Abd al-Wahhāb. Sebagaimana Ibn Taymīyah, Ibn ‘Abd al-Wahhāb hendak membebaskan Islam dari semua perusakan yang diyakini telah menggerogoti agama Islam dengan menunjukkan sikap intoleransi terhadap berbagai praktik agama populer di antaranya adalah tasawuf, doktrin perantara (*tawaṣṣul*), rasionalisme, ajaran Shī‘ah, serta banyak praktik lain yang dinilainya sebagai inovasi bid’ah.¹⁶

Gerakan Wahabī merambah ke Indonesia, atas peran murid-murid Ibn ‘Abd al-Wahhāb, di antaranya M. Abduh (w. 1905) dan M. Rashīd Riḍā (w. 1935). Kedua tokoh inilah, terutama Rashīd Riḍā yang menyebarkan faham Wahabī ke Indonesia baik secara langsung yaitu melalui murid-muridnya seperti KH. Ahmad Dahlan (1868-1923) dan yang lain¹⁷, maupun melalui publikasi majalah *al-Manār* yang didistribusikan melalui *al-Jamīyah al-Khayrīyah* atau yang dikenal dengan *Jamīyat Khayr*.¹⁸ Organisasi ini didirikan oleh orang-orang Arab di Indonesia pada tahun 1905. Melalui organisasi inilah, KH. Ahmad Dahlan mendalami faham Wahabī, dan ia

¹⁵ Ibn Taymīyah yakin bahwa prinsip-prinsip Islam cukup untuk menciptakan komunitas yang ideal. Untuk mencapai komunitas yang ideal ini, Ibn Taymīyah mengajukan pemahaman yang tepat mengenai Islam sebagai syaratnya. Hal ini menuntut seluruh pemahaman tentang keadaan dan spirit teks al-Qur’ān ketika diwahyukan. Pemahaman semacam itu akan lebih mendekatkan pengikutnya pada teks al-Qur’ān dan bukannya lewat perantara manusia. Sebagai akibat dari ketidakpercayaan terhadap perantara manusia, Ibn Taymīyah menolak taqlīd, terutama bagi sebagian mereka yang mampu melakukan ijtihād. Lihat Hamim, Paham, 11-12.

¹⁶ Menurut Sulaiman, kakak dari Ibn ‘Abd al-Wahhāb, sebagaimana di langsir oleh Khaled Abou Fadl, Ibn ‘Abd al-Wahhāb sangat selektif terhadap karya Ibn Taymīyah, dengan hanya mengutip apa yang disukainya dan membuang bagian yang lain. Mengenai catatan terhadap Ibn ‘Abd al-Wahhāb, lihat: Khaled Abou El Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, terj. Helmi Mustafa, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), 61-92.

¹⁷ Menurut Laode Ida, murid-murid M. Abduh dan Raṣīd Riḍā lainnya yang turut menyebarkan faham Wahabī adalah Shaikh Muḥammad Khaṭīb, Shaykh Ṭāhir Jalāluddīn, Shaykh Djamil Djambek, Abdul Karim Amrullah, Haji Abdullah Ahmad, Shaikh Ibrahim Musa dan Zainuddin Labbai al-Junusi. Baca Laode Ida, *Anatomi Konflik NU: Elite Islam dan Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1996), 3.

¹⁸ Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* (Surabaya: Duta Aksara Mulia, 2010), 44.

termasuk anggota yang ke 770.¹⁹ Di sini pula ia bertemu dengan Shaykh Ahmad Soerkatti (1872-1943), yang kemudian keduanya menjadi teman seperjuangan dalam rangka mengembangkan faham pembaharuan di Indonesia. Pada perkembangannya, KH. Ahmad Dahlan memperjuangkan pembaharuan dan pemurnian melalui Muhammadiyah, sedangkan Ahmad Soerkatti melalui organisasi *al-Irsyad*, setelah keluar dari *Jam'iyat Khayr*.²⁰

Menurut Deliar Noer, organisasi *Jam'iyat Khayr*, Muhammadiyah, al-Irsyad, dan Persis sebagai gerakan modern Islam²¹ mempunyai gerakan yang sama, yaitu pembaharuan dan pemurnian ajaran Islam dari praktik *tahayyul*, *bid'ah* dan *khurafāt* (agama puritan). Hal yang sama juga dikatakan oleh Kuntowijoyo. Ia berkata: “Gerakan pemurnian (di Indonesia) tampak ingin mendongkel budaya Islam sinkretik dan Islam tradisional sekaligus, dengan menawarkan sikap agama yang puritan...”.²²

Situasi yang dihadirkan komunitas reformis memantik para ulama (tradisional) untuk bangkit membela dan menjaga bangunan keagamaan yang berpijak pada tradisi dan intitusi madhhab sebagai suatu cara yang sah dalam memahami dan mengamalkan agama. Upaya pembelaan yang dilakukan oleh para ulama tentu saja bukan tidak berdasar. Sebaliknya, upaya yang dilakukan para ulama memiliki dasar yang sangat kuat, yakni bahwa proses pribumisasi yang terjadi di Nusantara berjalan secara dinamis adalah karena bentuk kontekstualisasi nilai-nilai agama terhadap masyarakat setempat dengan tanpa menghilangkan *ghāyah* (cita-cita)-nya yakni *tawhīd*.

Seiring dengan kemenangan ‘Abdul ‘Azīz Ibn Sa‘ūd (1880-1953 M) penguasa Nejed atas Sharīf Ḥusayn, penguasa Hijaz, maka penetrasi gerakan Wahabī dengan misi “agama puritan” semakin meluas

¹⁹ Ibid.

²⁰ Menurut Choirul Anam, keluarnya Ahmad Soerkatti dari *Jam'iyat Khayr* disebabkan oleh perbedaan soal kata *sayyid* dan bukan *sayyid* (gelar untuk keturunan Nabi Muhammad Saw). Orang-orang yang tergabung dalam *Jam'iyat Khayr* memegang teguh tradisi *sayyid* dan non-*sayyid*, sementara Ahmad Soerkatti menentang hal tersebut, karena pada dasarnya manusia itu sama dihadapan Allah tanpa terpancang pada *sayyid* dan non-*sayyid*. Ibid., 46.

²¹ Mengenai komunitas reformis yang diistilahkan sebagai gerakan modern Islam Indonesia, lihat Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial—LP3ES, 1980), 37-179 dan 247.

²² Kuntowijoyo, *Paradigama Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1998), 160.

hingga seluruh dunia Islam. Setelah menguasai Hijaz, kerajaan Saudi menjadi penopang gerakan Wahabī dibawah patronase dinasti Ibn Sa'ūd.²³ Dengan begitu, terjadi pergeseran pusat Islam, dari kebebasan model keagamaan tradisi madhhab *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah* ke arah model Wahabī yang pada gilirannya mendatangkan perubahan-perubahan yang tidak menguntungkan dalam pelaksanaan ajaran agama di tanah Hijaz lantaran tidak memberi toleransi terhadap praktik-praktik keagamaan *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah*.

Menindaklanjuti keadaan tersebut, didahului kegagalan dalam menyampaikan aspirasi lewat perutusan Indonesia dalam kongres Islam yang diadakan di Mekkah,²⁴ para ulama yang memiliki sependirian terhadap tradisi keagamaan *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah* membentuk suatu panitia khusus yang disebut dengan "Komite Merembuk Hijaz" yang selanjutnya dikenal Komite Hijaz.²⁵ Pada tanggal 31 Januari 1926, bertepatan dengan 16 Rajab 1334 H, di rumah K.H. Abdul Wahab Chasbullah, Surabaya, dikeluarkan dua keputusan penting: *Pertama*, meresmikan dan mengukuhkan berdirinya Komite Hijaz dengan masa kerja sampai delegasi yang diutus menemui Raja Ibn Sa'ūd kembali ke Tanah Air.²⁶ *Kedua*, membentuk *jam'iyah* (or-

²³ Ibid., 37.

²⁴ Aspirasi yang disampaikan kepada utusan Indonesia yang saat itu diwakili Tjokroaminoto dari Serikat Islam dan Mas Mansur dari Muhammadiyah adalah agar Ibn Sa'ūd melindungi kebebasan tradisi keagamaan bermadhhab bagi masyarakat setempat maupun masyarakat dunia Islam umumnya. Ditolaknya aspirasi oleh utusan ini adalah tidak mengherankan karena sebelum kongres pun para utusan yang merupakan orang-orang pembaharu (reformis) sudah tidak menyetujui praktik-praktik tradisi keagamaan bermadhhab. Lihat Martin van Bruinessen, NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, terj. Farid Wajdi (Yogyakarta: LKiS, 1994), 32-33.

²⁵ Para ulama yang hadir dalam sidang Komite Hijaz di kediaman K.H. Abdul Wahab Chasbullah di Kampung Kertopaten Surabaya adalah K.H. Hasyim Asy'ari, Tebuireng Jombang, K.H. Bisri Syansuri, Denanyar Jombang, K.H. Ridwan Abdullah dari Surabaya, K.H. Asnawi dari Kudus, K.H. Ma'sum dari Lasem, K.H. Ridwan dari Semarang, K.H. Abdul Halim dari Leiwimunding Cirebon, H. Nodoro Munthaha (menantu K.H. Kholil Bangkalan) dari Madura, Dahlan Abdul Kohar dari Kertosono, K.H. Nawawi dari Pasuruan, K.H. Nahrowi dari Malang, K.H. Alwi Abdul Azis dari Surabaya dan K.H. Abdul Khamid Faqih dari Sedayu Gresik, Syekh Ahmad Ghana'im al-Misri dari Mesir dan beberapa ulama lainnya. Lihat: Anam, Pertumbuhan, 1-2.

²⁶ Komite Hijaz, sesuai hasil sidang pada tanggal 31 Januari 1926, memutuskan untuk mengirim delegasi sendiri ke Kongres Umat Islam di Mekkah. Delegasi itu terdiri dari K.H. Wahab Chasbullah yang berangkat pada 29 Maret 1928 dan Syekh Ahmad Ghana'im al-Misri, berangkat 5 April 1928. Kedua utusan ini tidak bergabung dengan Kongres Umat Islam, namun langsung menghadap Raja Ibn

ganisasi) sebagai wadah persatuan ulama dalam tugas memimpin ummat menuju terciptanya cita-cita *'izzul Islām wa al-muslimūn* (kejayaan Islam dan kaum muslimin). Organisasi itu kemudian diberi nama Nahdlatul Ulama—atau Nahdlatul Ulama dalam ejaan yang disempurnakan.

B. Formula Gerakan Islam Fundamentalisme di Ponorogo

Sedangkan terkait dengan wadah gerakan Islam fundamentalisme, Dr. Miftahul Huda, M.Ag. (Direktur Aswaja Center Ponorogo) menyebutkan antara lain adalah PKS, HTI, Gerakan Salafi; MTA dan sebagainya. Terkait dengan PKS, Miftahul Huda menyebutkan adanya genealogi dengan gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Menurutny:

“.....Ikhwanul Muslimin saat ini menyebar kurang lebih di 70 negara, mulai dari Eropa, Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Tenggara hingga Amerika Serikat dan Kanada. Sifat jaringannya sangat fleksibel dan setengah tertutup. Nama gerakan berbeda-beda di setiap negara. Meskipun demikian, semua disatukan oleh pemikiran dan metodologi Ikhwan. Kekuatan utama gerakan ini adalah pembentukan kelompok-kelompok pengajian (*halaqoh*). Nah...secara umum, gerakan Ikhwan sekarang ini terbelah dalam dua arus besar, Ikhwan Tarbiyah dan Ikhwan Jihad... Ikhwan versi tarbiyah merupakan ikhwan versi resmi. Ikhwan versi tarbiyah tidak terlalu radikal, Tujuan utamanya tetap, yaitu membentuk “daulah Islamiyah”. Namun, cara yang ditempuh bersifat non-kekerasan. Mereka dapat memanfaatkan instrumen demokrasi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Model tarbiyah kemudian diterima secara luas di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Jalur Tarbiyah memasuki Indonesia pada dekade 1980-an. Tokoh penting yang mengusung jalur ini adalah Rahmat Abdullah dan Hilmi Aminudin Hasan. Ada tiga jalur penting pengembangan Ikhwan tarbiyah di Indonesia: Kelompok Usroh di kampus, alumni

Sa'ud, penguasa baru tanah suci Mekkah dan Madinah. Kedua orang ini diterima Raja Sa'ud pada tanggal 13 Juni 1928. Dalam dialognya, Raja Sa'ud memberikan sambutan yang positif terhadap tuntutan delegasi Hijaz. Raja Sa'ud memberikan jawabannya secara tertulis agar bisa diketahui oleh anggota Komite Hijaz lainnya. Dalam jawabannya, Raja Sa'ud berjanji akan tetap menjamin dan menghormati ajaran-ajaran madhhab yang empat (Ḥanafī, Mālikī, Shāfi'ī, dan Ḥanbalī) dan juga paham ahl al-sunnah wa al-jamā'ah di seluruh wilayah kerajaan. Lihat Sri Mulyati, "Pertarungan (Pemikiran) NU dan Kelompok Islam Lain", Tashwirul Afkar, No. 21 Tahun 2007, 10-11.

Timur Tengah, dan alumni LIPIA. Pertemuan tiga jalur inilah yang selanjutnya melahirkan PKS sekarang ini.”²⁷

Apa yang disampaikan Miftahul Huda tersebut sejalan dengan apa yang ditulis oleh M. Imdadun Rahmat dalam buku *Ideologi Partai PKS: Dari Masjid Kampus ke Parlemen*. M. Imdadun Rahmat menjelaskan tentang awal mula berdirinya PKS atau yang sebelumnya bernama PK (Partai Keadilan). Menurutnya, bibit-bibit PK muncul sekitar tahun 1970-an. Pada masa itu, bibit-bibit PK adalah para aktivis dakwah kampus. Para aktivis dakwah kampus tersebut mendirikan dan mengelola pengajian yang diwadahi dalam bentuk lembaga dakwah kampus (LDK). Lembaga ini kerap menyelenggarakan berbagai aktivitas keagamaan, seperti pengajian untuk mahasiswa. Aktivitas keagamaan lembaga tersebut, lebih bersifat rahasia atau lebih sering dilakukan secara diam-diam dan jika lembaga tersebut menyelenggarakan pengajian untuk banyak orang, mereka berkamufase dengan mengatasnamakan kegiatan mahasiswa.²⁸

Hal ini sengaja mereka lakukan karena pada masa itu, rezim yang berkuasa adalah rezim Soeharto. Rezim ini dikenal sangat represif terhadap gerakan keagamaan. Akan tetapi, situasi tersebut mulai berubah pada era 1990-an, saat Soeharto mulai menempatkan para aktivis Islam sebagai sekutu. Sejak saat itulah, gerakan yang semula bernama Usroh ini berganti nama menjadi Ikhwan dan mereka menamai aktivitas mereka dengan sebutan Tarbiyah.

Secara garis besar, gerakan ini terdiri dari lima elemen penting, yaitu *pertama*, DDII (Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia) dengan tokoh utamanya Mohammad Natsir. *Kedua*, aktivis LDK dan Rohis. *Ketiga*, alumnus perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi Timur Tengah. *Keempat*, aktivis ormas Islam. *Kelima*, da'i lulusan pesantren. Lima elemen tersebut bergerak bersama-sama, saling mendukung, dan saling menguatkan dengan fungsi dan perannya masing-masing.²⁹

Dari lima elemen tersebut, elemen yang paling berperan besar bagi lahirnya gerakan ini adalah DDII. Para aktivis DDII yang

²⁷ Disampaikan pada saat Daurah Aswaja di PP. Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo, tanggal 28 Maret 2014.

²⁸ M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen* (Yogyakarta: LKiS, 2008), 24.

²⁹ *Ibid.*, 29.

merupakan mantan aktivis Partai Masyumi yang dibubarkan pada awal masa pemerintahan Soeharto ini, menjadi inisiator awal berdakwah melalui kampus dan sekaligus peletak dasar-dasar strategi dakwah kampus. Selanjutnya, lahirlah LDK yang kemudian banyak bergerilya di dalam kampus. Kehadiran LDK tersebut terbukti telah menyumbangkan berbagai kemajuan umat Islam, misalnya lembaga ini bekerjasama dengan DDII banyak mengusahakan pembangunan masjid di sekitar kampus guna dipakai untuk berbagai aktivitas dakwah.³⁰

Selanjutnya, gerakan Tarbiyah membangun banyak lembaga, seperti lembaga pendidikan Nurul Fikri, lembaga dakwah Khoirul Ummah, kelompok kesenian nasyid, dan majalah Sabili. Selain itu, gerakan Tarbiyah juga menyebarkan berbagai gagasan dan pemikiran mereka melalui buku-buku yang diterbitkan antara lain oleh penerbit Gema Insani Press (GIP), Pustaka Al-Kautsar, Era Intermedia, dan Asy-Syamiil.³¹

Pada pertengahan tahun 1998, rezim Orde Baru pimpinan Soeharto tumbang. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh para aktivis Tarbiyah. Setelah berdiskusi cukup alot dan dalam waktu yang cukup lama, akhirnya mereka memutuskan untuk berdakwah dan berjuang lewat jalur politik. Akhirnya, pada agustus 1998, para aktivis Tarbiyah mendirikan Partai Keadilan (PK), sebuah parpol yang berasaskan Islam.

Selang setahun pasca-didirikan, parpol ini berhasil mengikuti pemilu dan mampu menjangkit 1.436.565 suara atau sekitar 1,36% dari keseluruhan jumlah suara dan menempatkan tujuh wakilnya di DPR. Pada Pemilu 2004, parpol yang semula bernama PK kemudian berganti nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) pada tahun 2002 ini, mampu meningkatkan jumlah suara secara signifikan. Pada Pemilu 2004 tersebut, PKS meraih 8.325.020 suara atau sekitar 7,34% dari total suara dan berhasil mendudukkan 45 wakilnya di DPR. Bahkan mantan Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid, berhasil menduduki jabatan Ketua MPR.³²

Dalam kancah politik, PKS memiliki peran yang signifikan bila dibandingkan dengan parpol baru lainnya. Salah satu hal yang cukup

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid., 37.

³² Ibid., 41.

bergema adalah isu-isu parlemen bersih dan kepedulian terhadap kepentingan rakyat. Selain itu, PKS juga kerap menyuarakan isu-isu moral. M. Imdadun Rahmat mensinyalir bahwa PKS sebagai kepanjangan tangan dari Partai Masyumi dan banyak terwarnai oleh ideologi perjuangan Ikhwanul Muslimin—sebuah organisasi keagamaan yang didirikan Hasan Al Bana di Mesir dan kemudian berkembang luas ke pelbagai negara—memiliki *hidden agenda*, yakni mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi Islam. Dia berpendapat demikian setelah mengamati dan meneliti berbagai agenda dakwah PKS, seperti aktivitas PKS dalam upaya menegakkan sistem pemerintahan Islam dengan pelbagai atributnya.³³ Menurutny, upaya PKS tersebut berpotensi melahirkan konflik dengan parpol-parpol lain yang berhaluan nasionalis. Selain itu, syariat Islam tidak mungkin bisa berdiri di Indonesia, karena Indonesia adalah negara majemuk dengan berbagai adat-istiadat, pola pikir, dan kepercayaan (agama) masyarakat.

Terkait dengan ideologi keagamaan PKS, Rahmat menyebutkan bahwa ideologi keagamaan PKS adalah Islam modernis yang memiliki afiliasi dengan gerakan Wahabi—sebuah gerakan keagamaan yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab dari Saudi Arabia. Ciri utama gerakan Wahabi ini adalah upaya menentang keras segala bentuk peribadatan Islam yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad. Sebenarnya, ideologi gerakan Wahabi ini telah berkembang luas di Indonesia sejak awal abad ke-19, ditandai dengan lahirnya organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah ini adalah sebuah organisasi keagamaan yang populer dengan penentangannya terhadap hal-hal yang berbau TBC (*tachayul*, *bid'ah*, dan *churofat*—ejaan lama). Meskipun demikian—secara tersirat—dia mengatakan bahwa gerakan dakwah PKS ini lebih berbahaya dari gerakan dakwah Muhammadiyah, karena sesungguhnya ideologi keagamaan PKS lebih memiliki keterkaitan erat dengan ideologi Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin merupakan sebuah organisasi keagamaan yang kontroversial. Kedua tokoh penting Ikhwanul Muslimin, yaitu Hasan Al Bana dan Sayyid Quthb, tewas dibunuh karena gerakan dakwahnya yang dianggap subversif dan mengancam keutuhan negara Mesir. Organisasi ini memang terjun ke politik praktis. Organisasi ini kerap mengkritik

³³ Ibid., 93.

hebat kebijakan pemerintah yang mereka anggap bertentangan dengan aturan Islam. Organisasi ini juga dituduh ikut serta dalam upaya penggulingan pemerintahan Mesir dengan cara melakukan penculikan tokoh-tokoh Mesir, pengeboman, dan penggalangan massa untuk melawan pemerintah. Akibatnya, organisasi ini ditekan habis-habisan oleh pemerintah Mesir, bahkan tokoh-tokohnya ditangkap dan dihukum mati. Lebih lanjut Rahmat beranggapan bahwa PKS itu berbahaya, karena secara tegas PKS menyatakan bahwa dirinya adalah anak ideologis Ikhwanul Muslimin (IM). Keberadaan PKS dianggap mampu mengganggu stabilitas Indonesia sebagaimana IM yang mengganggu stabilitas Mesir.³⁴

Sedangkan Hizbut Tahrir dianggap sebagai gerakan Islam Fundamentalisme karena jargon dan misi perjuangannya menegakkan *khilafah*. Menurut mereka, *khilafah* menjadi nomenklatur tidak tergantikan, sebagai dewa penolong, serta semua problem dan benang kusut yang ada di dunia sekarang ini, solusinya hanya satu; khilafah harus tegak dan dibaiatnya seorang khalifah. Sistem *khilafah* dianggap sebagai satu-satu sistem politik yang benar, islami, dan diakui oleh Allah serta diterima oleh Rasulullah. Sistem politik lain, semisal, republik, atau bahkan republik Islam, adalah tidak absah, tidak islami, dan haram, serta ilegal eksistensinya.

Mayoritas Pengurus Cabang NU Ponorogo menolak HTI dan memasukkannya ke kelompok Islam fundamentalisme karena sistem *khilafah* yang mereka usung. KH. Imam Sayuti Farid mengatakan bahwa: “Bagi NU, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati. Oleh karenanya, kalau HTI ingin mengganti NKRI dengan sistem *khilafah*, maka mereka harus berhadapan dengan NU”³⁵

Hal yang juga dikemukakan oleh KH. Muhsin (salah satu wakil Rois). Dia mengatakan bahwa: “Khilafah adalah fatamorgana. Ia adalah sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. Ormas-ormas Islam di Indonesia sudah berkomitmen dengan NKRI sebagai bentuk Negara yang final”³⁶

³⁴ Ibid., 119.

³⁵ Disampaikan pada saat Daurah Aswaja di PP. Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo, tanggal 28 Maret 2014.

³⁶ Disampaikan pada saat Daurah Aswaja di Masjid Insuri, tanggal 01 Juni 2015.

Sedangkan K. M. Asvin Abdurahman (Ketua Lembaga Bahtsul Masa'il PCNU Ponorogo), ketika penulis menanyakan tentang mengapa bagi NU, NKRI final, ia menunjukkan kepada penulis hasil Munas Alim Ulama tahun 2012 di Cirebon, yang isinya adalah sebagai berikut:

Ada tiga alasan mendasar, NU menyatakan bahwa NKRI sudah final:

- a. Bagi Nahdlatul Ulama' negara adalah sarana guna mencapai tujuan yaitu menjamin dan melindungi kehidupan manusia menuju masalah 'ammah yang selaras dengan tujuan syariat, yaitu terpeliharanya lima hak dasar manusia (*al-ushulul-khams*), yaitu perlindungan agama, perlindungan jiwa (ruh), perlindungan akal, perlindungan keturunan dan perlindungan harta.
- b. Nahdlatul Ulama' dalam persoalan bentuk negara lebih mementingkan substansi bukan lahiriahnya. Oleh karena itu, sekalipun negara yang kita huni dan mesti kita cintai ini disebut Negara Kesatuan Republik Indoesia (NKRI), tetapi secara substansial adalah negara Islam, sebagaimana dijelaskan di atas.
- c. Nahdlatul Ulama' menyadari akan kemajemukan Indonesia, baik agama, suku, ras, bahasa dan adat istiadat, sehingga memerlukan kearifan dalam memilih dan menentukan bentuk negara agar kemajemukan tetap terjaga dengan baik, sekaligus kebersamaan dan persatuan dapat dicapai tanpa ada pihak yang tersinggung dan tercederai. Dengan demikian, kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai, tentram, aman dan sentosa harus menjadi prioritas, bukan formalitas "Islam, Khilafah, Syari'ah atau lainnya" namun justru malah berujung pada perpecahan dan pertikaian.³⁷

Lebih lanjut, menurut penulis, konsekwensi dari sistem *khilafah* yang diusung HTI adalah berujung pada penolakan pancasila sebagai dasar negara. Sebagaimana yang telah tercatat dalam perjalanan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama` yang dilatar belakangi oleh faktor keagamaan dan faktor kebangsaan, NU berupaya mempertahankan dan mengembangkan ajaran Islam yang berhaluan *Ahl al-sunnah wa al-jamā'ah* di Indonesia. Meskipun demikian NU tidak mengidealkan bentuk negara Islam Indonesia. Nahdlatul Ulama melalui wakilnya, KH.Abdul Wahid Hasyim dalam tim

³⁷Hasil Munas Alim Ulama tahun 2012 di Cirebon

sembilan BPUPKI ikut merumuskan dan memutuskan Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia.³⁸ Di samping itu Nahdlatul Ulama juga menetapkan Presiden Soekarno sebagai *walīy al-amr bi al-ḍarūrī al-shawkah* (pemegang urusan pemerintah yang punya cukup kewibawaan dipatuhi oleh pejabat dan rakyat).³⁹

Ketetapan yang diambil Nahdlatul ulama tersebut bukanlah sesuatu yang dengan mudah begitu saja ditetapkan, melainkan dengan jalan pemikiran dan dialog yang intensif dikalangan internal Ulama NU melalui *Bahtsul Masa'il* dengan merujuk kepada tradisi intelektual Islam klasik. Sikap dan pemikiran NU untuk merespons segala macam perkembangan sosial dan dinamika politik tentu saja tidak bisa dilepaskan dari ciri khas NU yang bersikap *tawāsut* (moderat) dan *tasāmuh* (toleran).

Bagi NU, Pancasila dipandang bukan sebagai saingan agama apalagi menggantikan posisi agama, melainkan sebagai falsafah bangsa sedangkan agama merupakan wahyu yang berasal dari Allah SWT. Secara substansial Sila Ketuhanan yang Maha Esa dan sila-sila yang lain tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan kelima sila tersebut merupakan bagian dari implementasi ajaran Islam kecuali memang jika Pancasila ditafsirkan sebagai hal yang bertentangan dengan pesan-pesan aqidah secara fundamental.⁴⁰

Sedangkan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) dianggap sebagai bagian dari Islam Fundamentalisme karena beberapa pandangan MTA yang menuduh praktik keagamaan NU sebagai *tahayyul*, *bid'ah* dan *khurafat*, bahkan lebih dari itu, terma syirik dan kufr sering dilontarkan MTA untuk memberikan label kepada amaliyah warga NU. Di samping itu, metode pemahaman ataupun penafsiran terhadap ayat al-Qur'an yang mereka lakukan cenderung *skriptualis*, parsial dan tidak mau menggunakan pendapat para ulama pendahulu (imam madhhab dan pengikut-pengikutnya). Terkait dengan bagaimana MTA yang sering "menyerang amaliyah NU", KH. Imam Sayuti Farid mengatakan:

³⁸ Andree Feillard, *NU Vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, terj. Lesmana (Yogyakarta: LKiS, 2009), 32. Lihat pula: Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 120.

³⁹ PBNU, *Aḥkām al-Fuqahā*, 289.

⁴⁰ Moesa, *Nasionalisme Kiai*, 124.

“...tidak berbeda dengan kelompok radikal lain, MTA juga menyuarakan lagu yang sama. Lagu itu berjudul *syirik*, *bid'ah* dan *khurafat*. Ziarah kubur, tawassul mereka anggap perbuatan syirik, manakiban, diba'an bahkan juga mauludan mereka labeli dengan amaliah yang sarat dengan *bid'ah*..”⁴¹

Sedangkan dalam hal kerancuan dalam metodologi memahami ayat ataupun hadis, Miftahul Huda mengatakan:

“Dalam masalah manhaj, metodologi MTA dalam memahami agama adalah mendahulukan akal, kadang mengesampingkan hadits shahih (bila dianggap menyelisihi Al-Quran), apalagi atsar, atau perkataan para ‘ulama kibar. Dari metodologi ini maka anjing pun jadi halal, sutera dan emas untuk laki-laki juga mubah, atau paling banter jadi makruh hukumnya...”⁴²

Hal yang sama juga disampaikan oleh KH. Mahmudin Marsaid (Gus Din), ketika penulis mintai pendapatnya tentang pandangan MTA yang menghalalkan tikus dan anjing. Gus Din mengatakan: “Ini fatwa yang ngawur karena bertentangan dengan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,⁴³ (Gus Din kemudian menunjukkan hasil keputusan Bahtsul Masail kepada penulis)

تَمَسُّ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ، وَالْعُفْرَبُ، وَالْحَدْيَا، وَالْغَرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

“Ada lima jenis hewan fasiq (berbahaya) yang boleh dibunuh ketika sedang ihram, yaitu tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak dan kalb aqur (anjing galak).”

Imam Nawawi berkata: “Diharamkan hewan yang dianjurkan untuk dibunuh seperti ular, kalajengking, burung gagak, hida-ah dan tikus.” Diperintahkan untuk membunuh tikus dan binatang fasik lainnya karena binatang tersebut sering menyakiti (mengganggu) sehingga karena inilah haram dimakan. Sehingga jika ada yang menfatwakan tikus itu halal dimakan, itu fatwa keliru karena bertentangan dengan hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Jadi tidak bisa disembelih bukan berarti membuat makanan tersebut jadi halal seperti kata Bapak Ahmad Sukina.⁴⁴

⁴¹ Disampaikan pada saat Daurah Aswaja di PP Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo, tanggal 28 Maret 2014.

⁴² Wawancara penulis dengan Dr. Miftahul Huda, M.Ag. pada tanggal 4 November 2015, di Kampus Pascasarjana STAIN Ponorogo.

⁴³ Hasil wawancara dengan K. Mahmudin Marsaid pada tanggal 11 Mei 2015 di PP. Thoriqul Huda Cekok Kecamatan Babadan.

⁴⁴ Ibid.

Sedangkan dalam masalah aqidah, Dr. Iswahyudi (Sekretaris Aswaja Centre PCNU Ponorogo), menilai ada beberapa pandangan yang menurutnya berbeda dengan mainstream di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ia mengatakan:

“dalam masalah aqidah, MTA mengingkari adanya syafaat di hari akhir, mengimani bahwa begitu seorang muslim divonis masuk neraka, maka ia akan kekal selamanya (ini sama dengan pemahaman khawarij dan mu’tazilah), mengingkari adanya kesurupan, mengimani bahwa malam lailatul qadr sudah tidak ada lagi, mengimani bahwa Allah tidak menetapkan taqdir (tapi sebagai sebab akibat murni, ini pemahaman qadariyah mu’tazilah), tidak mengimani turunya Isa, munculnya Dajjal, dan Imam Mahdi...”⁴⁵

C. Infiltrasi Gerakan Islam Fundamentalisme ke dalam Nahdlatul Ulama

Fundamentalisme Islam, sebagaimana yang sudah dipaparkan di awal, tidaklah monolitik. Ia hadir dengan berbagai bentuk dan orientasi gerakan. Ada kelompok yang *concern* pada purifikasi ajaran Islam yang dianggap telah banyak terkontaminasi ajaran lokal dan perilaku *bid’ah*. Sebagian lagi fokus pada pelaksanaan dan penegakan shari’ah sehingga menolak semua ideologi yang tidak bersumber dari Islam. Kita juga dapat menjumpai kelompok yang anti Barat karena menganggap Barat adalah biang kehancuran Islam. Bahkan ada yang konsisten berjuang menegakkan *Khilāfah Islāmīyah*.

Dari berbagai kelompok tersebut, ada kelompok fundamentalisme Islam yang secara *fragmented* fokus pada bidang-bidang tertentu di atas, misalkan kelompok Wahabi yang fokus gerakannya adalah purifikasi ajaran Islam, Islam Tarbiyah (menjelma PKS) yang sangat *concern* untuk menegakkan shari’ah Islam. Tetapi ada juga yang secara komprehensif memperjuangkan semuanya, semisal Hizbut Tahrir.

Memperhatikan karakteristik dan orientasi gerakan fundamentalisme di atas, jelas tidak mudah mengidentifikasi seseorang telah terinfiltrasi ideologi fundamentalis. Sebagaimana kita tahu, sebelum hingga menjelang berakhirnya Orde Baru, kontestasi gerakan keagamaan di Indonesia didominasi organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang keduanya selama ini diidentifikasi secara tegas sebagai kelompok tradisional dan

⁴⁵ Disampaikan pada saat Daurah Aswaja di PP. Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo, tanggal 28 Maret 2014.

modern. Tetapi kontestasi itu menjadi kian ramai—untuk tidak mengatakan mencengangkan—terutama pasca Orde Baru, dengan hadirnya kelompok-kelompok keagamaan baru, yang diduga mereka mengimpor gerakannya dari Timur Tengah. Dikotomi tradisional-modern menjadi tidak relevan lagi, karena kelompok-kelompok baru tersebut secara terang-terangan menentang aktivitas keagamaan kelompok tradisional, di sisi lain mereka juga tidak dapat dikatakan modern.

Kata kunci dalam pembahasan ini adalah “infiltrasi”,⁴⁶ yang secara etimologi berarti penyusupan. Tetapi dalam penelitian ini penulis memperlebar makna kata tersebut ke ranah pengaruh gerakan Islam fundamentalisme ke dalam organisasi NU, baik dalam bentuk keterlibatan aktif, keterpengaruhan paham bahkan hingga pergeseran pemahaman warga NU yang condong kepada ideologi Islam fundamentalis, dan juga usaha penguasaannya terhadap tempat ibadah, sekolah dan madrasah yang notabene milik warga NU oleh kelompok Islam fundamentalisme.

Infiltrasi gerakan Islam fundamentalisme ke dalam warga NU dalam bentuk keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan Islam fundamentalisme antara lain, masuk dalam kepengurusan PKS dan sebagai guru di lembaga yang dikelola oleh PKS, antara lain sebagaimana yang disampaikan oleh KH. Muhatim Hasan (Katib Syuriah PCNU Ponorogo):

“Dulu mas, salah anggota dewan dari PKS (*penulis merahasiakan identitasnya*) berasal dari keluarga NU, ia aktif di IPNU. Ia mulai berubah menjadi anggota PKS setelah mereka kuliah di Timur Tengah. Bahkan dulu, yang mengeluarkan surat rekomendasi untuk mendapatkan beasiswa di Timur Tengah ya saya sendiri.”⁴⁷

Hal yang sama juga disampaikan oleh K. Muhaji (Ketua MWC Kecamatan Slahung):

“Ada beberapa anak Slahung, setelah ia kuliah di Surabaya, kemudian ia pulang, sekarang ia terlibat di sekolah yang didirikan PKS. Di sini ada sekolah yang di dirikan PKS dan banyak anak-anak orang NU seperti yang saya katakan tadi, setelah pulang kuliah di Surabaya, Jogja, sekarang sudah tidak mau terlibat dalam kegiatan NU seperti IPNU,

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴⁷ Wawancara dengan KH. Muhatim, Wakil Rois Syuriah PCNU Ponorogo pada tanggal 11 Maret 2015, di Kantor PCNU Ponorogo.

Ansor, bahkan mereka sudah tidak mau ikut tahlilan, manaqiban dan sebagainya. Sekarang mereka aktif di berbagai kegiatan mereka (PKS)....”⁴⁸

Fakta lain yang cukup mencengangkan adalah terdapat salah seorang da'i yang aktif mengisi acara di salah satu Radio Wahabi di Ponorogo, di mana dalam materi ceramahnya, ia sering menyerang amaliyah NU. K. Syahrul Munir (salah satu Katib syuriah PCNU Ponorogo) mengatakan:

“Dia itu alumni Pondok Hudatul Muna, bahkan dulu ia pernah menjadi Lurah Pondok. Perubahan sikap dan bahkan paham keagamaannya yang cenderung wahabi, seperti saat ini, setelah ia lama bekerja sebagai TKI di Arab Saudi....”⁴⁹

Pernyataan K. Syahrul Munir tersebut juga dibenarkan oleh beberapa Pengurus Cabang yang lain, termasuk Ketua Fatayat NU, Siti Raudlatun Nikmah.⁵⁰

Di tempat terpisah, setelah penulis mengetahui bahwa dai yang dimaksud berdomisili di Jambon, penulis bertanya kepada Khoirul Anwar, S.Ag (Ketua MWC Jambon) tentang aktifitas dai tersebut di wilayah kecamatan Jambon. Ia mengatakan:

“Bener pak luthfi, orang itu dulu mondoknya di Jenes (Pondok Hudatul Muna), naliko sik diasuh kiai Qom (KH. Qomarudin Mufti). Saiki ...byuh..byuh, adoh pak luthfi, berubah 180 derajat. Saiki emoh tahlilan, emoh yasinan. Bahkan sing kurang ngajar, dewe'e nek ceramah nang endi-endi, pokoke gur ngelek-ngelek tahlilan, yasinan sak pinunggalane sing dadi amaliyaha wong NU...”⁵¹

Bentuk infiltrasi lain gerakan Islam Fundamentalisme adalah keterlibatan orang-orang wahabi dalam berbagai tempat ibadah, masjid dan musholla serta lembaga pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh orang-orang NU. Hal tersebut tercermin dari pengakuan beberapa pengurus MWC, antara lain yang dikemukakan oleh Bapak

⁴⁸Laporan K. Muhaji, Ketua MWC Kecamatan Slahung pada tanggal 28 Maret 2015, pada saat kegiatan Dauroh Aswaja di PP. Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo.

⁴⁹Wawancara dengan K. Syahrul Munir, pada tanggal 15 Oktober 2015 di Kantor PCNU Ponorogo.

⁵⁰Wawancara dengan Siti Roudlatun Nikmah, pada tanggal 15 Oktober 2015 di Kantor PCNU Ponorogo.

⁵¹Wawancara dengan Khoirul Anwar, pada tanggal 20 Oktober 2015 di Kantor MWC Kecamatan Jambon.

Madudin (Ketua MWC kecamatan Badegan). Dalam sebuah acara dauroh Aswaja, ia mengatakan:

“...sekarang ini, di daerah Badegan sudah banyak masjid dan Musholla yang dikuasai oleh kelompok-kelompok anti tahlil, yasinan, manaqiban. Mereka di samping sudah mulai mengatur masjid dan musholla, mereka juga mulai memberikan ceramah diberbagai kegiatan warga nahdliyin. Banyak Musholla dan Masjid terawihnya tidak lagi 20 rekaat, melainkan 8 rekaat...Bahkan sekarang sudah mulai warga nahdliyin yang ikut MTA. Mereka mulai mendatangi masyarakat dari rumah ke rumah untuk bergabung dengan kegiatan mereka”⁵²

Hal yang sama juga disampaikan oleh K. Kasanun (Rois Syuriah MWC Sawoo), K. Mahfudh (Ketua MWC Kecamatan Sampung), K. Saifulloh (Ketua MWC Kecamatan Ngrayun).

Lebih lanjut K. Mahfudh mengatakan: “..Untuk mendapatkan simpati masyarakat, mereka melalui pondok tertentu (penulis rahasiakan) memberi bantuan pembangunan masjid, tempat wudlu dan sebagainya, bahkan sudah ada tokoh agama (kiai) yang bergabung dengan MTA”⁵³

Lebih lanjut, K. Saifulloh mengatakan bahwa banyak masjid/musholla yang dicarikan dana ke Timur Tengah dengan berbagai persyaratan; di masjid tidak boleh ada beduk, kentongan, tidak boleh *pujian* setelah adzan, tidak ada wiridan setelah sholat, sholat terawih harus delapan rekaat.⁵⁴

Apa yang disampaikan K. Saifulloh tersebut benar adanya. Pada saat penulis melaksanakan kegiatan safari Ramadhan tahun 1436 H, penulis menyaksikan sendiri di salah satu masjid NU persis yang disampaikan K. Saifulloh yaitu tidak ada beduk, kentongan, tidak ada *pujian* setelah adzan, tidak ada wiridan setelah sholat dan sholat terawih dilaksanakan delapan rekaat.

Indikasi terjadinya pergeseran pemahaman warga NU ke arah pemahaman Islam fundamentalis, juga ditegaskan Isnatin Ulfah da-

⁵²Laporan K. Madudin, Ketua MWC Kecamatan Badegan pada tanggal 28 Maret 2015, pada saat kegiatan Dauroh Aswaja di PP. Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo.

⁵³Laporan K. Mahfudh, Ketua MWC Kecamatan Sampung pada tanggal 28 Maret 2015, pada saat kegiatan Dauroh Aswaja di PP. Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo.

⁵⁴Laporan K. Saifulloh, Ketua MWC Kecamatan Ngrayun pada tanggal 28 Maret 2015, pada saat kegiatan Dauroh Aswaja di PP. Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo.

lam *Dari Moderat ke Fundamentalis: Pergeseran Pemahaman Keagamaan Kaum Tradisionalis (NU) di Ponorogo*. Dalam penelitiannya, Ulfah menjelaskan pergeseran pemahaman orang NU tersebut dalam dalam empat katagori;

1. Islam dan Budaya Lokal

Dalam isu Islam dan Budaya Lokal, Ulfah mendapati beberapa warga Nahdliyin yang menyatakan secara pribadi lebih nyaman ketika beribadah ada tuntunannya dari al-Qur'an dan Sunnah, sering mempertanyakan praktek-praktek keagamaan yang menurutnya tidak bersumber dari perilaku Nabi, dan keinginannya untuk untuk beribadah sesuai dengan yang dicontohkan Nabi dan para sahabatnya. Hal itu secara implisit menunjukkan penolakannya terhadap beberapa amalan kelompok tradisional yang selama ini banyak mengadopsi budaya lokal yang menurutnya tidak ada pernah dipraktekkan Nabi.⁵⁵

Bahkan Ulfah juga menemukan seseorang yang menyatakan sebagai pengikut NU yang kultural, tetapi dia memiliki pandangan sangat berbeda dengan *mainstream* di kalangan NU.

Orang tersebut menyatakan bahwa segala bentuk peribadatan, pada dasarnya haram kecuali yang diperintahkan, sehingga bentuk peribadatan yang tidak ada dasarnya dalam al-Qur'an atau sunnah dianggap *bid'ah* seperti peringatan tujuh hari, empat puluh hari, dan seterusnya untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Kalau Nabi tidak pernah mencontohkannya, amalan itu menyimpang. Mungkin bahasa ekstremnya saat ini adalah sesat, *bid'ah*. Ungkapan informan itu sesungguhnya menegaskan keyakinan kaum *nahdīyīn* yang menerima amalan ibadah, betapapun tidak ada dasar hukumnya, sepanjang itu *hasanah*. Jadi tidak semua *bid'ah* itu ditolak. Sekali lagi, dalam konteks ini tampaknya karakter NU yang moderat dalam bidang kebudayaan dan adat istiadat, menjadi landasan berperilaku warganya.⁵⁶

Pandangan informan ini kompatibel dengan pandangan Wahabi yang memandang umat Islam telah menyimpang dari ajaran Islam yang murni karena banyak mempraktekkan *bid'ah, khurafāt, taḥāyūl*

⁵⁵ Isnatin Ulfah, *Dari Moderat ke Fundamentalis: Pergeseran Pemahaman Keagamaan Kaum Tradisionalis (NU) di Ponorogo* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2014), 102.

⁵⁶ *Ibid.*, 104.

dan semacamnya. Untuk mengembalikan umat Islam pada ajaran Islam murni, Wahabi melakukan purifikasi *tawhīd*.

Apa yang disampaikan para informan tersebut, menurut Martin E. Marty, merupakan bentuk perlawanan terhadap ancaman yang membahayakan eksistensi agama. Segala perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama, merupakan ancaman terhadap orisinalitas agama. Dari sisi ini, informan sesungguhnya mendasarkan praktik keagamaannya pada orientasi masa lalu (*salaf*). Informan mengidealkan Islam seperti ketika Islam dilahirkan. Itulah salah satu karakteristik menonjol dari kelompok fundamentalis.

2. Pengamalan Ibadah Ritual

Perdebatan tentang pengamalan ibadah ritual, misalkan tentang *qunut*, jumlah raka'at shalat tarawih, talqin bagi jenazah biasanya terjadi antara kelompok Islam tradisionalis dan kelompok Islam modernis. Tetapi kontestan dalam perdebatan itu saat ini bertambah. Ada kelompok lain di luar dua kelompok di atas, yang selama ini diidentifikasi sebagai kelompok fundamentalis.

Dalam konteks pengamalan ibadah ritual, perilaku ibadah yang selama ini dipraktekkan kelompok fundamentalis misalkan shalat, selalu mereka laksanakan dengan cara-acara dan aturan yang sangat ketat. Misalkan tentang merapatkan *ṣāf* dalam shalat *rawātib*. Kaum fundamentalis dengan secara penuh melaksanakannya sesuai bunyi teks *ḥadīth*, dalam hal merapatkan dan merapikan barisan.

Ulfah mendapati dua orang dari kalangan NU melakukan ritual shalat jama'ah yang berbeda dengan mayoritas warga Nahdliyin, dalam hal merapatkan dan merapikan barisan. Bahkan mereka mempertanyakan konsistensi kelompok tradisionalis dalam hal menjaga ortodoksi sebagai pengikut *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*.⁵⁷

3. Isu Islamisasi dan Formalisasi Shari'ah

Isu Islamisasi dan Formalisasi Shari'ah saat ini terus menerus menjadi kajian banyak kalangan, hal ini karena terjadi perdebatan apakah shari'ah Islam harus diimplementasikan secara formal sehingga harus menjadi peraturan resmi pemerintah, atau ia cukup diintegrasikan dalam kehidupan individu.

⁵⁷ Ibid., 106.

NU secara tegas menolak ide islamisasi dan formalisasi shari'ah, karena bagi NU islamisasi diperbolehkan, tetapi islamisasi dari bawah bukan dari atas. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan keyakinan kelompok fundamentalis. Bagi kelompok fundamentalis, pemberlakuan shari'ah itu harus diformalkan dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan. Penegakkan shari'ah itu harus didukung oleh negara, karena shari'ah dapat berlaku dan berdampak efektif kalau diformalkan dalam bentuk peraturan dan perundangan yang dilegalkan oleh pemerintah, bukan sekedar kewajiban individu. Jadi pelaksanaan shari'ah itu bersifat *top-down*, pemerintah harus menginisiasi dan menciptakan peraturannya.

Menurut Ulfah ada empat warga NU menyetujui—dengan beberapa persyaratan dan argumentasi—wacana islamisasi dan formalisasi shari'ah yang bersifat *top-down* tersebut, yang sesungguhnya itu adalah karakter fundamentalis. Salah satu karakter Islam fundamentalis, sebagaimana disampaikan oleh Imarah, adalah usahanya yang serius untuk mengimplementasikan shari'ah Islam secara total. Hal ini karena shari'ah Islam bagi kelompok fundamentalis, tidak hanya mengatur urusan ibadah, tetapi juga masalah *siyāsah* sehingga agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Agama adalah bagian integral dari negara, tidak berdiri sendiri, sehingga formalisasi shari'ah oleh negara adalah keniscayaan.⁵⁸

Bahkan salah satu warga NU tersebut mengidealkan shari'ah itu mengkristal dalam kehidupan umat Islam, tanpa harus dipaksakan menjadi perda atau perundangan-undangan negara. Ini sangat khas pandangan NU, terutama kiai Shiddiq. Tetapi, informan akhirnya menyepakati islamisasi dan formalisasi shari'ah, dengan syarat masyarakat membutuhkannya. Tentu ini berbeda dengan NU, yang dengan konsisten menolaknya.

Pandangan para informan tentang islamisasi dan formalisasi shari'ah Islam tersebut, merupakan karakter menonjol dari kelompok Hizbut Tahrir. Orientasi gerak kelompok ini adalah memperjuangkan tegaknya *Khilafah Islāmīyah*, menuntut implementasi shari'ah untuk menciptakan kondisi umat Islam yang islami, serbelum mereka siap menjadi bagian dari *Khilafah Islāmīyah*.

⁵⁸ Ibid., 108.

4. Jilbab dan Model Busana Muslimah

Dalam masalah ini, Ulfah menemukan dua informan yang menggunakan busana muslimah berbeda dengan busana *mainstream*. Ciri mencoloknya adalah berjilbab besar, dan menggunakan baju yang longgar. Salah satu dari dua orang tersebut, menurut Ulfah, ada yang menarik untuk dianalisis, karena semangat mengenakan busana tersebut bukan karena dorongan dari dalam dirinya, tetapi karena tuntutan *outsider*.⁵⁹

Betapapun pada awalnya itu bukan merupakan kehendak dari dirinya, tetapi karena perilaku itu menjadi kebiasaan yang sangat lama, akhirnya dia menikmatinya dan tidak ingin meninggalkannya. Dari sisi ini, informan dapat dikatakan mengalami pergeseran dari yang semula karena tuntutan *outsider*, menjadi kesadaran diri sendiri.

Berjilbab dan mengenakan busana yang besar dan longgar, tentu berbeda dengan model berbusana *mainstream* yang ada di NU, bahkan di Indonesia. Busana semacam ini menjadi *trend* di kalangan tertentu, bersamaan dengan maraknya aktifitas dan gerakan fundamentalis yang ideologi dan orientasi gerakannya mengimpor dari Timur Tengah. Oleh sebab itu, tidak salah jika ada anggapan bahwa busana seperti itu adalah ciri khas kelompok Islam fundamentalis, bukan Islam tradisional.

Pemahaman yang tekstualis dan normatif, serta karakternya yang mengidealkan Islam masa lalu, diduga menjadi alasan mereka mengenakan busana seperti itu. Perempuan berjubah dan berjilbab besar, bahkan berpurdah. Sementara yang laki-laki menggunakan baju koko panjang sampai lutut, tetapi celana panjangnya cingkrang, di atas mata kaki, disertai ciri khas lain yaitu jenggot.

Kebiasaan itu, bisa dilihat di hampir semua ekspresi penampilan fisik kelompok fundamentalis: Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin, Jama'ah Tabligh, Wahabi, dan sebagainya. Melihat hal tersebut, tampak bahwa mereka sangat kuat keterikatannya dengan tradisi keagamaan yang telah diwariskan oleh para pendahulunya, sehingga mereka menolak modernisasi keberagaman yang berbeda dengan para pendahulunya. Bagi mereka masa lalu itulah yang ideal, sementara sekarang ini sudah banyak terkontaminasi Barat. Ini sejalan dengan prinsip penolakan mereka terhadap perkembangan historis dan

⁵⁹ Ibid., 110.

sosiologis. Perkembangan masyarakat dalam sejarah dipandang sebagai *as it should be*, sehingga masyarakat yang harus menyesuaikan perkembangannya dengan teks, bukan sebaliknya.

5. Isu *Khilāfah Islāmīyah*

Salah satu perjuangan gerakan fundamentalisme Islam, tidak terkecuali di Indonesia adalah mendirikan negara Islam *Khilāfah Islāmīyah*. Suatu bentuk pemerintahan Islam transnasional, yang dipimpin seorang khalifah. Tetapi sebaliknya, NU yang selama ini mengembangkan Islam Indonesia secara tegas menolak wacana mendirikan negara Islam ataupun *Khilāfah Islāmīyah*. Bagi NU, NKRI adalah harga mati, sehingga setiap upaya untuk menggantinya, harus diwaspadai.

Dari lima informan yang diwawancarai, Ulfah menemukan satu orang yang memberi pandangan positif terhadap *Khilāfah Islāmīyah*. Baginya *Khilāfah Islāmīyah* itu satu-satunya cara untuk melawan dominasi Barat. *Khilāfah Islāmīyah* yang dapat menyatukan semua umat Islam di dunia dalam satu kekuasaan, tentu memiliki kekuatan yang sangat besar untuk melawan Barat yang saat ini menjadi satu-satunya penguasa dunia.⁶⁰

Hizbut Tahrir adalah kelompok fundamentalis yang sangat getol memperjuangkan tegaknya *Khilāfah Islāmīyah*. Keyakinan Hizbut Tahrir bahwa Barat adalah musuh, Barat yang menyebabkan kemunduran Islam, mereka wujudkan dalam bentuk mendirikan *Khilāfah Islāmīyah* yang sebetulnya secara politis ingin melawan Barat. Jadi, apa yang disampaikan informan sebetulnya sangat khas Hizbut Tahrir, dan sangat jauh dari karakter NU.

D. Respons Nahdlatul Ulama Ponorogo terhadap Gerakan Islam Fundamentalis

Melihat perkembangan gerakan Islam fundamentalis yang semakin ekspansif seperti yang telah digambarkan di atas tersebut, maka PCNU Ponorogo yang merasa bahwa jama'ahnya kerap menjadi sasaran empuk bagi doktrin-doktrin puritan merasa perlu memberikan respons yang cukup nyata. Respons di sini memang tidak secara langsung diwujudkan dalam bentuk menyerang kaum fundamentalis, melainkan justru bersifat rekonsolidasi dan revitalisasi terhadap

⁶⁰ Ibid., 112.

semua sumberdaya, baik yang bersifat diskursif seperti aqidah dan amaliah, maupun terhadap semua aset yang dimiliki NU. Berikut ini akan digambarkan beberapa respons yang diberikan oleh kalangan NU, baik dari struktural maupun dari kelompok kultural, terhadap fenomena ekspansi gerakan Islam fundamentalisme.

Menurut KH. Muhsin, pada pertengahan bulan Juli tahun 2011, atas instruksi PWNU Jawa Timur, PCNU Ponorogo mendirikan Aswaja Centre. Lembaga ini dimaksudkan untuk membentengi NU dari serangan doktrin Islam fundamentalis. KH Muhsin mengatakan;

“...Aswaja NU Center merupakan sebuah perangkat pelaksana program bentukan NU sesuai dengan tingkat kepengurusan. Aswaja NU Center yang dibentuk oleh NU ini memiliki tujuan untuk membentuk masyarakat NU yang mampu membentengi diri dari faham-faham lain serta dapat meyakinkan orang lain atas kebenaran faham Aswaja NU.”⁶¹

Lebih lanjut KH. Muhsin menjelaskan bahwa visi didirikannya lembaga tersebut adalah terwujudnya wawasan keislaman Aswaja sesuai keberagaman Rasulullah bersama para sahabat. Misinya adalah mengaktualisasi pemahaman umat tentang keislaman Aswaja NU, meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengalaman (menginternalisasi) Islam Aswaja NU sebagai prilaku umat dalam kehidupan sehari-hari.⁶²

Menurut KH. Muhsin, kehadiran lembaga ini sangat mendesak karena begitu gencarnya kaum fundamentalis menyerang, menuduh bid'ah, syirik terhadap praktik amaliah NU di satu sisi, dan di sisi lain, jamaah NU terkaget-kaget dengan serangan tersebut. Hal itu sangat dimaklumi, karena selama ini orientasi ajaran ahl al-sunnah wal jama'ah hanya terhenti pada pola pembiasaan. Menurutnya, idealnya pola internalisasi paham aswaja, hendaknya melalui tahapan pembiasaan, pemahaman, dan pembelaan. Untuk saat ini, ketika amaliah NU dihujat, diserang, jangankan untuk melakukan advokasi dan pembelaan, kebanyakan jama'ah atau warga nahdliyin mengalami keterkejutan secara budaya. Hal itu terjadi karena warga nahdliyin selama ini hanya mengamalkan tradisi yasinan, ziarah

⁶¹ Materi Dauroh yang disampaikan KH. Muhsin pada tanggal 28 Maret 2015, pada saat kegiatan Dauroh Aswaja di PP. Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo.

⁶² Ibid.

kubur, manaqiban, tawassul, membaca qunut ketika sholat shubuh dan sebagainya tidak dibarengi dengan pemahaman terhadap dalil rujukannya.⁶³

Langkah awal yang dilakukan Aswaja NU Center Ponorogo adalah mendorong dan merekomendasikan PCNU untuk mendirikan sebuah radio sebagai *counterpart* terhadap Radio Idzaatul Khoir, sebuah radio komunitas yang salah satu program acaranya menghabisi amaliyah NU seperti tahlilan, yasinan dan sebagainya.⁶⁴

Satu bulan menjelang bulan Ramadhan tahun 1432 H di tahun 2011, PCNU Ponorogo mendirikan Radio Aswaja FM dengan frekwensi 101.9 dengan motto Radio Aswaja FM menebar Islam Rahmatan lilalamin. Rekomendasi pendirian Radio Aswaja FM ini, sebagaimana diakui oleh H. Sugeng Hariono (penggagas Radio FM), setelah PCNU sering mendapatkan keluhan dari warganya tentang acara radio Idzaatul Khoir. Acara pengajian Radio tersebut yang menyerang amaliyah NU dengan label syirik, bid'ah, khurafat dan sebagainya dirasa sangat meresahkan masyarakat.⁶⁵ Di antara wujud keresahan masyarakat, mereka melakukan demo, memprotes siaran radio tersebut yang meresahkan masyarakat.

Menurut KH. Muhsin langkah strategis yang dilaksanakan Aswaja NU Center Ponorogo dalam rangka membentengi faham ahl al-sunnah wa al-jama'ah, mencakup beberapa program kegiatan:⁶⁶

1. Daurah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah (Dakwah)

Kegiatan ini merupakan program yang bertujuan mencetak kader-kader pembela ahl al-sunnah wa al-jama'ah. Kegiatan daurah ini meliputi;

- a. Pengkaderan Massal; semua pengurus cabang, MWC, ranting diundang untuk mendapatkan materi aswaja; pada tanggal 29 September 2011 Aswaja NU Center Ponorogo bekerjasama dengan Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur menyelenggarakan

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Materi Dauroh yang disampaikan KH. Muhsin pada tanggal 28 Maret 2015, pada saat kegiatan Dauroh Aswaja di PP. Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo.

⁶⁵ Wawancara dengan Sugeng Hariono, pada tanggal 23 Oktober 2015, di Kantor PCNU Ponorogo.

⁶⁶ Wawancara dengan KH. Muhsin pada tanggal 10 November 2014 di STAIN Ponorogo.

- daurah aswaja dengan narasumber KH. M. Idrus Romli.⁶⁷ Pada tanggal 20 Mei 2012, Aswaja NU Center Ponorogo mengundang KH. Abdurrahman Navis (Direktur Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur) bersama KH. M. Idrus Romli, untuk tindak lanjut materi daurah sebelumnya.
- b. Daurah Rutin, 3 bulan sekali yang diikuti oleh Banom, Lajnah, MWC, Ranting. Berbeda dengan daurah massal, dauroh ini pesertanya lebih terbatas, dan narasumbernya dari unsur Mustasyar, Syuriah dan Tanfidziyah PCNU Ponorogo. Dalam daurah ini, di samping disampaikan materi aswaja, aswaja NU center juga melakukan pemetaan problem yang dihadapi oleh masing-masing MWC dan Ranting terkait paham ahl al-sunnah wa al-jama'ah.
 - c. *Training Of Trainer (TOT) Aswaja*. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari alumni daurah rutin. TOT ini dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Masing-masing MWC mengirim 3 orang kader yang akan dilatih untuk mensosialisasikan aswaja NU kepada warga nahdliyin di ranting-ranting sesuai dengan wilayah MWC-nya.
 - d. Dauroh aswaja bagi guru-guru sekolah yang berada di Lingkungan Pendidikan Maarif. Daurah ini dimaksudkan untuk membekali guru aswaja sekaligus untuk memperluas wawasan mereka tentang persoalan aswaja kekinian yang perlu disampaikan kepada para siswa. Kegiatan ini dilaksanakan setahun sekali.
 - e. PKP NU (Pelatihan Kader Penggerak NU). Berbeda dengan daurah pada poin sebelumnya, dauroh ini merupakan program Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di bawah koordiansi KH. Ali As'ad (Wakil Ketua PBNU periode 2009-2014). Pola PKP NU ini terbagi dalam dua kegiatan: 1) PCNU Ponorogo mengirimkan peserta ke berbagai daerah baik di Jawa maupun luar Jawa; 2) PCNU Ponorogo mengundang tim PKP NU pusat untuk kegiatan di Ponorogo.

⁶⁷KH. M. Idrus Romli merupakan salah satu tim ahli aswaja NU Center PWNU Jawa Timur. Dia alumni Pondok Sidogiri Pasuruan. Sejak mengajar di Pesantren pada 1998, dia sering mengisi pelatihan kaderisasi Ahlussunnah Wal-Jama'ah yang disebut ANNAJAH (istilah ASWAJA di Pondok Pesantren Sidogiri). Setelah keluar dari pesantren, dia sering mengisi acara-acara seminar, halaqah dan pelatihan ASWAJA di beberapa cabang NU Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dia juga aktif di diskusi dua bulanan Institut Pemikiran dan Peradaban Islam (INPAS) Surabaya.

- f. Integrasi OSIS–IPNU IPPNU di sekolah-sekolah Maarif. Kegiatan ini lebih diorientasikan pada penanaman militansi anak-anak usia SLTP dan SLTA terhadap paham ke-NU-an sekaligus menyiapkan kader-kader penerus perjuangan para ulama NU.⁶⁸

2. Kajian Islam Ahl al-Sunah wa al-Jama’ah (Kiswah)

Bentuk kegiatan ini adalah seminar, pengajian tentang ahl al-sunah wa al-jama’ah. Sasaran kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman warga Nahdliyin terhadap argumentasi atau dalil yang menjadi rujukan berbagai amaliyah NU. Beberapa kiai dan ustadz didatangkan untuk memberikan tausiyah tentang amaliah aswaja, antara lain KH. Marzuki Mustamar (Ketua PCNU Malang) dan Drs. KH. Ali Shodiqin (tokoh sentral Mafia Sholawat).

3. Usaha Sosialisasi Ahl al-Sunah wa al-jama’ah (Uswah)

Kegiatan uswah ini lebih diorientasikan pada upaya sosialisasi, pemantapan, dan peningkatan pemahaman warga NU terhadap paham aswaja. Usaha sosialisasi ini dilaksanakan dengan:

- a. Optimalisasi Lailatul Ijtima’ (LI) untuk mensosialisasikan aswaja. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan jam’iyyah Nahdlatul Ulama dari waktu ke waktu yang sampai sekarang eksistensinya masih jadi primadona warganya adalah Lailatul Ijtima’. Secara terminologi Lailatul Ijtima’ terdiri dari dua suku kata yaitu lailah dan al- ijtima`. Lailah di artikan malam dan al-ijtima` diartikan kumpulan. Jadi lailatul Ijtima` dapat di artikan perkumpulan di waktu malam. Lalilatul ijtima merupakan wadah atau sarana berkumpulnya atau bertemunya pengurus NU di masing-masing tingkatannya dengan warga atau anggota jamiyyah Nahdlatul Ulama. Lailatul Ijtima (LI) diadakan oleh pengurus NU pada masing-masing tingkatan dari Pengurus Besar (PB) sampai dengan Pengurus Ranting(PR) yang sangat besar kontribusinya pada pemantapan organisasi ataupun diniyyah (keagamaan). Bentuk kegiatan LI berbeda-beda di sesuaikan dengan situasi dan kondisi di masing-masing kepengurusan. Pada umumnya kegiatan LI diisi dengan pengajian dengan acara seremonial ritual misalnya sholat ghaib, pembacaan manaqib Syekh Abdul Qodir al-Jailani, tahlilan dan doa bersama. Bagi warga NU kegiatan LI

⁶⁸ Disarikan dari berbagai dokumen kegiatan di PCNU Ponorogo

sangat bermanfaat sebagai ajang silaturahmi juga sebagai *sharing* dan komunikasi pengurus dengan warga atau anggotanya terkait masalah keorganisasian dan juga keagamaan yang berkembang di masyarakat. Seiring dengan tantangan gerakan Islam fundamentalis, LI ini dioptimalkan fungsinya untuk memperkuat ajaran aqidah Islamiyah ala Ahl al-sunnah wa al-jama`ah.⁶⁹

- b. Sosialisasi berbagai kegiatan daurah aswaja melalui di Radio Aswaja FM. Sosialisasi ini dimaksudkan, agar warga nahdliyin bisa mengikuti atau menghadiri acara yang akan dilaksanakan.
- c. Penerbitan Buletin. Saat ini Aswaja NU Center Ponorogo telah menerbitkan buletin, yang memuat amalan warga NU disertai dengan dalil-dalil yang menjadi rujukan. Di samping itu, buletin ini juga memberikan jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi warga, baik persoalan ibadah, persoalan kasuistik (*wāqī'iyah*), tematik (*mawḍū'iyah*).
- d. Pendistribusian Majalah AULA⁷⁰ ke semua MWC dan Ranting. Turba ke seluruh MWC
- e. Safari Ramadhan di seluruh MWC. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan Ramadhan mulai tahun 2011 sampai sekarang. Untuk mendukung kegiatan ini, Aswaja NU Center Ponorogo bekerja sama dengan Lembaga Dakwah NU (LDNU). Safari Ramadhan dilaksanakan sebulan penuh di 21 MWC dengan format pengajian umum setelah sholat terawih. Dai' maupun daiyah yang memberikan ceramah tergabung dalam LDNU.

4. Maktabah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah (Makwah)

Untuk menunjang referensi serta memperkaya bacaan warga nahdliyin terutama buku-buku yang berkaitan dengan dalil-dalil amaliyah NU, Aswaja NU Center Ponorogo bekerja sama dengan dengan Aswaja NU Center PWNNU Jawa Timur menyediakan buku-buku aswaja

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Majalah Aula adalah majalah bulanan yang diterbitkan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNNU) Jawa Timur. Terbit Resmi dengan SK PWNNU Jawa Timur Tahun 1978. Majalah Aula termasuk media yang cukup lama bertahan dengan segmen pembaca yang fanatik, terutama dari kalangan orang NU di Jawa Timur. Dalam perkembangannya, oplah Majalah Aula pernah mencapai 20.000 eks.

5. Bimbingan Islam Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah (Biswah)

Program biswah ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman warga Nahdliyin tentang aswaja melalui pengajian kitab kuning di Radio Aswaja. Di samping itu, pengajian kitab kuning ini dimaksudkan untuk mendekatkan masyarakat dengan *turats*, kitab-kitab klasik yang selama ini hanya dibaca dan dikaji di pondok-pondok pesantren. Teknis pelaksanaannya dibagi menjadi 2 sesi, *pertama*, kitab kuning dibaca ala pesantren (*utawi, iki iku*) disertai penjelasan maksud dari materi yang dibaca (*ma'na al-murād*) dan pada sesi *kedua*, dibuka tanya-jawab, baik secara langsung melalui kontak telepon maupun melalui sms. Sejak tahun 2011 kitab yang dibaca adalah:

- a. Kitab *Fatḥh al-Qarīb al-Mujīb*.
- b. Kitab *Fatḥh al-Mu'īn*
- c. Kitab *Nihāyat al-Zayn*.

Ketiga kitab tersebut dibaca setiap sore antara pukul 16.00 sampai menjelang adzan maghrib oleh Tim Bahtsul Masa'il PCNU Ponorogo.

Di samping tiga kitab di atas, juga diputar rekaman pengajian kitab *al-Hikam* karya al-Shaykh 'Aṭāillāh al-Sakandārī, yang dibaca oleh KH. Imron Jamil pada siang hari, dan KH. Jamaludin Ahmad pada pagi hari.⁷¹

KESIMPULAN

Penelitian berhasil menemukan pandangan Nahdlatul Ulama (NU) Ponorogo tentang adanya gerakan Islam fundamentalis, formula dan gerakannya, dampak maupun infiltrasinya ke dalam NU serta respons NU dalam menghadapi gerakan tersebut. Temuan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Para kiai NU Ponorogo berpendapat bahwa gerakan Islam fundamentalis berakar dari gerakan purifikasi dengan ideologi wahabi, yang ingin ingin mengembalikan seluruh tananan kehidupan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Amaliyah jam'iyah NU seperti tahlilan, yasinan, tawassul, ziaroh kubur dan sebagainya menjadi sasaran gerakan ini dengan labelisasi *bid'ah*, *syirik* atau bahkan *kufir*. Formula

⁷¹Wawancara dengan K. M.Asvin Abdurrohman, pada tanggal 24 Oktober 2015, saat bersama-sama studi Banding ke PP. Sidogiri Pasuruan.

gerakan ini berupa gerakan Tarbiyah yang menjelma menjadi PKS, HTI dan Dakwah salafi, seperti MTA dan sebagainya. Gerakan Islam fundamentalis ini telah berhasil menginfiltrasi ke dalam NU, baik dalam bentuk keterlibatan aktif warga NU, keterpengaruhan paham bahkan sampai pergeseran pemahaman warga NU yang condong kepada ideologi Islam fundamentalis sampai penguasaan beberapa tempat ibadah.

2. Dalam merespons gerakan Islam fundamentalis, para kiai NU di bawah koordinasi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Ponorogo, mendirikan Aswaja NU Center. Semua bentuk kegiatan dan upaya membentengi warga NU dari gerakan Islam fundamentalis dikalsifikasikan ke dalam lima program kegiatan; 1) Dauroh Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah (Dakwah), 2) Kajian Islam Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah (Kiswah), 3) Usaha sosialisasi Islam Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah (Uswah), 4) Maktabah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah (Makwah) dan 5) Bimbingan Islam Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah (Biswah).

PENUTUP

Penelitian ini belum mampu mengungkap peran secara langsung yang dilakukan oleh gerakan Islam fundamentalis dalam mengajak, mempengaruhi warga NU untuk bergabung dengan gerakan mereka. Penelitian ini juga belum menjangkau secara langsung orang-orang NU yang disebutkan para informan telah bergabung dengan gerakan Islam fundamentalis. Di masa yang akan datang, penelitian ini perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan dua hal tersebut berikut cakupan atau sasaran penelitian yang lebih fokus. Penelitian ini terbuka untuk dikembangkan, dievaluasi, direvisi, dan dilengkapi oleh hasil penelitian-penelitian lain di masa yang akan datang.

DAFTAR RUJUKAN

- Abou El Fadl, Khaled. *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*. terj. Helmi Mustafa. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Ahmad Arif, *Fundamentalisme di Jantung NU*, <http://pol2009.blogspot.com/2010-/03/fundamentalisme-di-jantung-nu.html>. Diakses 15 Mei 2013
- Anam, Choirul. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. Surabaya: Duta Aksara Mulia, 2010.
- Bruineseen, Martin van. *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. terj. Farid Wajidi. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Feilard, Andree. *NU Vis a Vis Negara Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna*. Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Hamim, Thoha. *Paham Keagamaan Kaum Reformis: Studi Kasus Pemikiran Moenawar Chalil*. terj. Imron Rosyidi. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Hasan, Noorhaidi. *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta, LP3ES, 2008.
- Ida, laode. *Anatomi Konflik NU: Elite Islam dan Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1996.
- Khoiruddin. *Politik Kiai, Polemik Keterlibatan Kiai dalam Politik Praktis*. Malang, Avverous, 2009.
- Kuntowijoyo. *Paradigama Islam Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 1998.
- Moesa, Ali Maschan. *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. Jogjakarta: LKiS, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2002.
- Mulyati, Sri "Pertarungan Pemikiran NU dan Kelompok Islam Lain." dalam *Tashwirul Afkar*. No. 21 tahun 2007.

Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial— LP3ES, 1980.

Rahman, Fazlur. *Metode dan Alternatif Neo-Modernisme Islam*. ed. Taufik Adnan Amal. Bandung: Mizan, 1994.

Rahmat, M. Imdadun. *Ideologi Politik PKS Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*. Yogyakarta: LkiS, 2008.

Ummatin, Khoiro. *Perilaku Politik Kiai*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009.